

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap instansi pemerintah atau badan swasta, baik besar maupun kecil pasti bertujuan untuk mencapai target yang telah ditetapkan, dengan memanfaatkan fasilitas yang ada semaksimal mungkin dan memperhatikan kerja sama yang baik di antara anggota organisasi tersebut. Kerjasama merupakan faktor penting dalam organisasi, maka harus diperhatikan pula bagaimana kerjasama itu dapat terlaksana dengan baik. Dengan demikian organisasi membutuhkan kerjasama yang terpinpin, agar masing-masing individu atau kelompok mengetahui apa yang menjadi tugas dan wewenangnya dalam laju gerak organisasi.

Pengertian pelaksanaan kegiatan itu perlu, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam tugas dan tanggung jawab sehingga efisiensi kerja dapat tercapai. Untuk itu dibutuhkan seorang pemimpin yang dapat mengatur, menertibkan dan mengendalikan organisasi.

Demikian pula halnya dengan Kepala Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya tentu tidak luput dari permasalahan organisasi, yang dalam hal ini menyangkut pada segi kepemimpinan yang apabila kita telusuri lebih dalam lagi maka masalah tersebut akan bermuara pada segi bagaimana pemimpin menerapkan dirinya dan memfungsikan dirinya di dalam jabatannya yang



diembannya.

Pimpinan diharapkan memberikan contoh tauladan dan juga kebijaksanaan kepada para bawahannya sehingga dengan demikian akan dapat memberikan pandangan bagi bawahannya tentang penyelesaian tugas di dalam organisasi tersebut.

Kepemimpinan pada dasarnya adalah proses mempengaruhi orang lain. Kepemimpinan seseorang dipengaruhi oleh tiga atau perilaku pemimpin masing-masing. Yang dimaksud dengan tipe kepemimpinan, tidak lain adalah pola perilaku yang ditampilkan oleh seorang pemimpin. Pada saat pemimpin itu mencoba untuk mempengaruhi orang lain sepanjang diamati oleh orang lain. Dengan kata lain apabila persepsi seseorang pemimpin terhadap perilaku kepemimpinannya baik dan bermanfaat, tidak berarti baik dan berfaedah menurut persepsi orang lain.¹

Kepala Dinas adalah pemimpin bagi organisasi dinasny, baik itu secara struktural maupun secara kenegaraan. Kepemimpinan kepala Dinas meliputi juga bagian-bagian yang ada di bawahnya. Sebagai suatu jenjang pelaporan tugas bagi bawahan maka keberadaan kepala Dinas amat penting dalam pelaksanaan struktur organisasi pemerintahan, termasuk halnya pelaksanaan suatu sistem administrasi pemerintahan di Sekretariat Pemerintah Kota Binjai.

Permasalahan yang sering ditemukan di tanah air kita Indonesia ini adalah pemimpin terkadang dianggap sebagai orang suci yang fatwa dan perintahnya merupakan suatu dilema yang harus dijalankan. Akibat dari keadaan tersebut

¹ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bina Aksara, Jakarta: 2002, hal. 75.